

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2018, maka disusun Rencana kerja tahun 2020 serta pagu indikatifnya. Rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2020 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020.

6.1.1 Program Pembangunan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2020 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2020, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan telah ditetapkan Program dan kegiatan sebagaimana tabel 6.1.

Tabel 6.1
Program Pembangunan dan Penanggung Jawab Tahun 2020

KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1101	Pendidikan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Menengah	
		Program Pendidikan Khusus	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	
1102	Kesehatan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	
		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
		Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	
		Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	

KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
		Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat	
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Pembangunan Sumberdaya Air	
		Program Penataan Ruang	
1104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	
		Program Keciptakarya	
1105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	
		Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	
		Program Perlindungan Masyarakat	
		Program Penanganan Bencana Kebakaran	
1106	Sosial	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Pemberdayaan Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Fakir Miskin	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	
		Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti	
1201	Ketenagakerjaan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
		Program Penempatan Tenaga Kerja dan	

KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
		Transmigrasi	
		Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	
1202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
1203	Pangan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
		Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	
		Program Perlindungan Konsumen Pangan	
1205	Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
1206	Administrasi Kependudukan dan Capil	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
1207	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	
		Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
1208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
1209	Perhubungan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	
1210	Komunikasi dan Informatika	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	
1211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	
		Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
		Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	
		Program Pelatihan SDM Koperasi dan	

KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
		UMKM	
1212	Penanaman Modal	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Penanaman Modal	
1213	Kepemudaan dan Olahraga	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	
		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	
		Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	
1214	Statistik	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
1215	Persandian	Program Tata Kelola Persandian	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
1216	Kebudayaan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian Kebudayaan	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
1217	Perpustakaan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
		Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	
1218	Kearsipan	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2001	Kelautan dan Perikanan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
2002	Pariwisata	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Program Pemasaran Produk Pariwisata	
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
2003	Pertanian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	

KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
		Program pengawasan dan sertifikasi benih	
		Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program penyediaan dan pemasaran benih	
2004	Kehutanan	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2005	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	
		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	
2006	Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	
		Program Perlindungan dan Pengawasan Industri	
		Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
2007	Perindustrian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Saing Industri	
		Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	
3001	Administrasi Pemerintahan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung
		Program Pembangunan Kemitraan	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
		Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
		Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Perekonomian
		Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum
		Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi
		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Pemerintahan
		Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum
		Program Pelayanan Umum	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD

KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
3002	Pengawasan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Provinsi
		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
3003	Perencanaan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
3004	Keuangan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		Program Penatausahaan Aset Daerah	
3005	Kepegawaian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
3006	Pendidikan dan Pelatihan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Pengembangan SDM Aparatur	
		Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	
3007	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1.2 Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah maka arahan prioritas belanja pada perangkat daerah sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS BELANJA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.189.487.800.000	1. Penganggaran BOS dan BOSDA 2. Pengadaan Lahan untuk USB 8 Sekolah 3. Pembangunan RKB
2	Dinas Kesehatan	666.504.100.000	1. Penambahan Penganggaran Jaminan Kesehatan dalam rangka pelaksanaan UHC 2. Pembangunan RSUD Malingping beserta Alkesnya 3. Rekrutmen Tenaga Medis dan Nakes Lainnya 4. Pembangunan RSUD Ciligrang dan Alkesnya

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS BELANJA
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	701.787.914.000	Penyelesaian Target Pembangunan Jalan dan Jembatan
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	938.527.700.000	1. Pembangunan Sport Center 2. Penataan Wisata Religi Cikadueun dan Caringin 3. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
5	Satuan Polisi Pamong Praja	20.472.600.000	1. Penegakkan Peraturan Per UU Daerah 2. Penanganan Bencana Kebakaran
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.527.900.000	1. Koordinasi Kedaruratan dan 2. Koordinasi Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana; 3. Koordinasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Kebencanaan 4. Koordinasi kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.171.800.000	1. Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA; 2. Pendidikan Politik Masyarakat.
8	Dinas Sosial	20.728.700.000	1. Rehabilitasi Sosial; 2. Pemberdayaan Sosial; 3. Perlindungan dan Jaminan Sosial; 4. Penanganan Pakir Miskin; 5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti.
9	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	50.506.100.000	1. Upaya Pengurangan Pengangguran 2. Pengawasan dan Pelatihan ketenagakerjaan 3. Peningkatan Kualitas BLKI
10	Dinas P3AKKB	10.023.000.000	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak; 2. Kependudukan; 3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Kegiatan PKK
11	Dinas Ketahanan Pangan	14.116.900.000	1. Peningkatan ketahanan pangan; 2. Keterjangkauan Pangan; 3. Perlindungan Konsumen.
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24.821.500.000	1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; 2. Pengelolaan dan Konservasi Hutan; 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.652.400.000	1. Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Desa; 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 4. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri.
14	Dinas Perhubungan	60.666.810.000	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Kualitas layanan perhubungan.
15	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	34.945.200.000	1. Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi (Bandwidth);

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS BELANJA
			2. Pengembangan Teknologi Informasi; 3. Pengembangan Sarana Aplikasi; 4. Keterbukaan Informasi Publik.
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.418.000.000	Pembangunan Sentra UKM di Kesultanan Banten dan Tangerang
17	Dinas PMPTSP	10.841.100.000	Pencapaian Target Investasi PMDN dan PMA, berupa : 1. Peningkatan Kualitas Layanan Investasi dan Kerjasama Investasi; 2. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal; 3. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35.000.000.000	1. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga; 2. Peningkatan Prestasi Olah Raga.
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	12.211.000.000	1. Pengembangan Budaya Baca; 2. Pembinaan Perpustakaan 3. Koleksi Buku dan Kualitas Layanan Perpustakaan;
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.135.700.000	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap; 2. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 3. Peningkatan Daya Saing Perikanan.
21	Dinas Pariwisata	16.432.500.000	1. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 2. Pengembangan dan Penataan Destinasi Pariwisata; 3. Pemasaran Produk Pariwisata.
22	Dinas Pertanian	55.984.000.000	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	36.683.500.000	1. Pengawasan dan Rekomendasi Perizinan; 2. Standarisasi Perizinan ESDM; 3. Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan; 4. Elektrifikasi.
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.685.000.000	1. Pembangunan Pusat Distribusi; 2. Pengembangan Perdagangan; 3. Peningkatan Daya Saing Industri; 4. Pelayanan Pengembangan Teknologi dan 5. Pelayanan Standarisasi Industri;
25	Sekretariat DPRD	176.601.500.000	Fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD
26	Biro Pemerintahan	4.087.000.000	Perumusan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan
27	Biro Hukum	2.991.300.000	Peningkatan kualitas Produk dan Pelayanan Hukum
28	Biro Organisasi	2.536.100.000	Penataan Organisasi dan tata Laksana
29	Biro Bina Perekonomian	4.299.076.000	Perumusan Kebijakan Pembangunan Perekonomian
30	Biro Kesejahteraan Rakyat	9.940.000.000	1. Perumusan Kebijakan Pembangunan

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS BELANJA
			Kesejahteraan Rakyat;
31	Biro Umum	59.866.000.000	Pelayanan Umum
32	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	2.282.400.000	Perumusan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
33	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	6.623.500.000	Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
34	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	38.834.600.000	Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan
35	Badan Penghubung	6.541.900.000	Pembangunan Kemitraan.
36	Inspektorat Provinsi	26.133.900.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.879.450.000	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran; 2. Implementasi Hasil Penelitian.
38	Badan Pendapatan Daerah	145.020.700.000	1. Peningkatan Pendapatan Daerah; 2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendapatan Daerah.
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.877.000.000	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
40	Badan Kepegawaian Daerah	12.540.600.000	Pemetaan Kompetensi Aparatur;
41	BPSDM Daerah	48.655.000.000	Peningkatan Kualitas Kompetensi Aparatur dan Infrastruktur Kediklatan.
JUMLAH		4.627.041.250.000	

6.2. Pendanaan Daerah

Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020 berdasarkan Urusan, Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada Buku II.